PAMFLET

EDISI 6, OKTOBER 2015

REDAKSI

REDAKSI

Raka Ibrahim
Fahmi Nur Ichsan

PENULIS

Nabilla Reysa
M. Hisbullah Amrie
Justian Darmawan
Maulida Raviola
Firman Suryani

TATA LETAK & SAMPUL

Syennie Valeria

REDAKSI

CATATAN REDAKSI

Rumah saya dulu selemparan batu dari Lubang Buaya. Bahkan sejak kecil, saya selalu terpana melihat gerbang megah Monumen Pancasila Sakti dan penasaran apa yang ada di ujung jalan masuk yang panjang itu. Suatu ketika, orang tua saya memenuhi rasa ingin tahu saya dan membawa saya masuk Monumen tersebut. Saya menatap heran pada diorama-diorama kaku, buku panduan pengunjung yang berwarna merah darah, dan pameran baju korban yang masih menyisakan bekas darah. Jujur, saya merasa tidak nyaman. Museum itu bau anyir. Ruangannya gelap dan sunyi. Lubang yang terkenal itu disinari lampu neon murahan dan penuh slogan dramatis serta foto-foto sadis.

Saya tidak pernah kembali ke Lubang Buaya sejak saat itu. Ada perasaan kosong di sana yang masih membekas dalam diri saya sampai sekarang. Konon katanya, lima puluh tahun yang lalu, sebuah kekuatan politik yang kurang ajar membelot dan membunuh tujuh pahlawan bangsa: enam orang Jenderal kenamaan, dan satu orang tentara yang tidak karuan sialnya. Tetapi Indonesia tak mau digoncang. Kita menumpas pemberontakan itu dengan heroik, dan keteguhan Pancasila bertahan dari rongrongan setan Komunis yang makar. Sisanya, kita anggap, adalah sejarah.

Perlu waktu yang sangat lama bagi saya pribadi untuk menyadari betapa sempit dan dangkalnya pengertian sejarah yang satu ini.

Sekarang kesempatan kita untuk belajar bahwa kisah G-30S tidak berhenti pada tanggal 30 September 1965. Bahwa “setan yang berdiri mengangkang” itu agaknya belum berhasil dibongkar pada 21 Mei 1998. Yang terjadi sebelum, ketika, dan setelah 30 September 1965 adalah sejarah yang jauh lebih rumit ketimbang sekedar kisah penumpasan pemberontakan. Jangan sampai kita - meminjam istilah Koil - terus “merasa benar-benar pintar memasyarakatkan kebodohan” ini.

Jangan berhenti membaca.

Redaksi,

Raka Ibrahim & Fahmi Nur Ichsan

(BUKAN) RIAK KECIL DALAM SAMUDERA REVOLUSI INDONESIA

Pada 1 Oktober 1965, terjadi penculikan serta pembunuhan terhadap Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani dan lima jenderal lainnya beserta seorang perwira menengah salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh. Jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur mati yang kini ditahbiskan sebagai Monumen Pancasila Sakti. Pada hari yang sama, orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini kemudian menguasai stasiun pusat Radio Republik Indonesia dan menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang akan melindungi Presiden dari komplotan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Mereka kemudian menamai gerakan mereka sebagai Gerakan 30 September (G-30S) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal Presiden.

Setelah peristiwa itu, Angkatan Darat di bawah komando Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) berada dibalik G-30S. Tuduhan ini kemudian dilanjutkan dengan merekayasa sebagian besar bukti untuk menyulut kampanye anti-PKI, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang.

Periode selanjutnya adalah mimpi buruk: Soeharto kemudian melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno dan melakukan penangkapan hingga pembunuhan terhadap sedikitnya 500 ribu orang yang dituduh PKI. Bahkan, beberapa sumber meyakini terdapat satu juta orang korban pembantaian selama periode 1965 sampai 1966. Pembantaian ini sendiri disebut-sebut merupakan pertumpahan darah terburuk pada abad ke-20. Padahal, ketika G-30S muncul, Soekarno menyebut G-30S hanyalah riak kecil dalam samudera revolusi Indonesia yang penuh dengan pemberontakan (RMS, DI/TII, PRRI/Permesta).

Namun, benarkah G-30S hanyalah riak kecil? Ternyata tidak juga. G-30S adalah pintu masuk bagi rezim militer yang merampas kebebasan warga negara dalam berpikir dan bertindak selama lebih dari tiga puluh tahun. Lebih buruk lagi, menurut John Roosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal, identitas bangsa Indonesia setelah Peristiwa 1965/66 berubah total. Semangat anti-kolonialisme hilang, dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa.

Sebenarnya, peristiwa G-30S muncul disebabkan oleh meruncingnya tiga kekuatan politik saat itu: PKI, Militer, dan Soekarno. Keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, dan kala itu sepertiga menteri berasal dari militer. Pada momen inilah, pertama kalinya muncul istilah “Dwifungsi” bagi peran militer. Sementara itu, PKI kala itu tengah tumbuh pesat. Pada Pemilu 1955, mereka menempati urutan keempat dengan 6,1 juta suara. Dua tahun kemudian dalam pemilihan daerah, jumlah suara untuk PKI melejit hampir 40 persen.

Dengan kondisi seperti ini, tak mengherankan jika Soekarno melihat PKI sebagai sekutu penting guna mengimbangi tekanan pihak militer. Soekarno membutuhkan PKI guna memperlancar kampanye anti Barat yang secara intensif dilakukannya, yaitu anti imperialisme dan kolonialisme, dan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Bagi Soekarno hanya PKI yang mampu melakukan pengerahan massa dalam rangka kampanye tersebut. PKI tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung Presiden Soekarno dalam rangka menghadapi Angkatan Darat yang dikenal sangat anti-komunis, dan dianggap sebagai penghambat usaha-usaha PKI untuk melebarkan kekuasaannya.

Kondisi ini makin buruk karena pada tahun 1964 terjadi ketegangan dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Amerika Serikat sangat khawatir bahwa Indonesia makin dekat dengan sekutu di Utara, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini tentu membuat Amerika bergerak mencegah komunis berkuasa di Indonesia. Bahkan, John Roosa mengatakan bahwa Washington menganggap kemungkinan jatuhnya pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan komunis sebagai hari kiamat.

Seiring dengan gencarnya aksi ‘ganyang Malaysia’, kekuatan PKI semakin menonjol. Aksi-aksi kaum tani dalam memperjuangkan reformasi agraria semakin gencar dilakukan. Bagi PKI, aksi macam ini adalah tindakan yang adil dan patriotik, karena bertujuan melaksanakan undang-undang negara dan menguntungkan pemerintah serta rakyat di luar kaum tani. Sebab, aksi-aksi tersebut dapat membantu memecahkan masalah pangan. Bersamaan dengan itu, PKI kemudian membuat terobosan serius pada awal 1965 dengan ide bahwa petani dan buruh harus dipersenjatai, dilatih, dan dijadikan angkatan kelima, selain tiga angkatan bersenjata dan polisi. Rencana tersebut kontan langsung ditolak oleh perwira Angkatan Darat seperti Jenderal Ahmad Yani. Tak hanya itu, PKI juga melancarkan kritik terhadap kepentingan bisnis pribadi perwira kelas atas.

Di tengah suasana politik itu, muncul dua kabar yang membuat pihak Angkatan Darat dan PKI bersiaga. Pertama, adalah munculnya kabar bahwa Soekarno tengah sakit keras. Jika sampai meninggal, maka perebutan kekuasaan akan terjadi. Siapa yang bergerak lebih dulu akan dengan segera memegang tampuk kekuasaan. Yang kedua adalah kabar munculnya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden.

Kabar ini mengudara setelah ditemukannya apa yang disebut dokumen Gilchrist. Dokumen ini konon adalah telegram rahasia dari duta besar Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist, kepada atasannya di London, yang menyebutkan kemungkinan kerja sama dengan “*our local army friend* (teman-teman tentara lokal kita)”. Memang tidak ada bukti kuat yang menegaskan bahwa Dewan Jenderal sedang merencanakan kudeta, tapi menurut Hughes dalam *Indonesia Upheaval*, “sulit untuk mempercayai bahwa jenderal-jenderal tingkat tinggi di Indonesia tidak memiliki rencana merebut kekuasaan. Dalam suasana masa itu, jenderal-jenderal tersebut akan menjadi naif jika tidak membuat persiapan”.

Sisanya adalah sejarah. Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang dituduh terkait dengan partai itu. Tentara Soeharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30S, tanpa melalui proses hukum. Ratusan ribu orang dibantai secara semena-mena oleh Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, pada akhir 1965 sampai pertengahan 1966. Pada tahap ini, ucapan Soekarno terbukti benar: Angkatan Darat “mau membunuh tikus, (tapi) seluruh rumahnya dibakar.”

> “...lebih pas untuk menulisnya sebagai ‘the people’s history’ daripada ‘pelurusan sejarah’ untuk menjaga ingatan para pelaku sejarah peristiwa ‘65. Karena, tidak ada sejarah yang tunggal.”

Nani Nurrahman Sutojo

SELAIN VERSI RESMI

Peristiwa G-30S hingga kini masih diyakini sebagian orang sebagai sebentuk penertiban, bukan pembantaian. Bahkan, aksi yang menggadang-gadang misi ‘pemulihan keamanan’ ini berhasil membawa Soeharto kepada posisinya sebagai pahlawan pembawa kebebasan dan pencipta kedamaian karena berhasil menumpas kekacauan yang terjadi akibat PKI. Gambaran pahlawan yang diciptakan hanya bagi seorang Soeharto dimemorialisasi, jika tak ingin menyebutnya sebagai indoktrinasi, serta diwariskan melalui pemutaran film *Pengkhianatan G-30-S/PKI* setiap 30 September - 1 Oktober selama 13 tahun. Sebuah film garapan Arifin C. Noer yang dikesankan merayakan kesedihan, merayakan keberhasilan Soeharto sekaligus memperlihatkan kesedihan mendalam atas terbunuhnya Jenderal-Jenderal.

Sedangkan PKI, dalam narasi Orde Baru, digambarkan sebagai pemberontak dan pembangkang. Karena mereka pemberontak, maka harus ditumpas. Seakan-akan penumpasan adalah kata kegemaran yang patut disandingkan jika mewacanakan PKI pada masa itu. Pemberontakan yang diungkit dalam narasi sejarah yang kita ketahui mengenai PKI adalah Pemberontakan 1926 tehadap Hindia Belanda, Peristiwa Madiun (*Madiun Affair*) tahun 1948, dan tentu saja G-30S pada tahun 1965.

Pembantaian itu membuat simbol palu arit menjadi begitu sensitif. Siapapun yang membicarakan atau menggunakan simbol tersebut dianggap Komunis, tidak beragama, melawan negara dengan cara-cara yang mengerikan. Sejarah menjadi menakutkan, kebenaran menjadi mustahil untuk diungkapkan. Padahal, sudah terlalu lama narasi yang tunggal berkuasa. Setelah dikaji lebih jauh oleh berbagai peneliti, sejarawan, dan tim pencari fakta, rupanya banyak fakta sejarah soal G-30S yang selama ini dianggap mutlak benar tidak sehitam putih itu.

PKI DALANG UTAMA G-30S

G-30S masih menjadi bagian dari sejarah kelam yang disembunyikan kebenarannya hingga saat ini. Tidak ada yang berani mengemukakan kebenarannya, karena memang tak tahu yang mana yang benar. Yang jelas, sumber resmi yang merupakan narasi tunggal rezim Orde Baru menyatakan bahwa PKI-lah yang menjadi dalang dari peristiwa berdarah tersebut.

Faktanya, ada lima versi berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Ada lima kemungkinan dalang dibalik peristiwa pembunuhan massal, yaitu:

1.) PKI (Sumber resmi versi Orde Baru yang disusun oleh Kolonel Nugroho Notosusanto dan Letnan Kolonel Ismail Saleh),

2.) Masalah Internal AD (Menurut peneliti Universitas Cornell, Amerika Serikat),

3.) Soekarno (Menurut sejarawan Antonie C. A. Dake),

4.) Soeharto (Menurut sejarawan W. F. Wertheim,), dan

5.) Jaringan Inteligen dan CIA (Menurut pejabat intelijen AS, Peter Dale Scott).
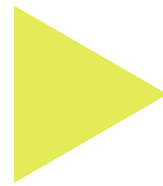
KOMUNIS "TIDAK BERAGAMA"

Jika dihadapkan dengan cerita-cerita berbau PKI atau Komunisme, masyarakat cenderung menghindar. Anggapan-anggapan bahwa PKI dan Komunisme tak beragama sudah terlanjur melekat dalam memori banyak orang. Propaganda semacam ini ada dan terus diwariskan secara turun temurun. Padahal kebenarannya diragukan.

Berdasarkan pengakuan beberapa anggota PKI, mereka sama sekali tak kesulitan untuk menjadi seseorang yang religius. Bahkan, Dipa Nusantara Aidit dan wakilnya di PKI M.H Lukman mendalami agama dan berasal dari keluarga yang religius. Musso, yang merupakan tokoh penggerak PKI di Jawa Timur hingga peristiwa 1948 pun sosok yang religius dan juga merupakan keturunan Kyai Hasan Muhyi, pendiri Pondok Pesantren Kapurejo di Kediri.
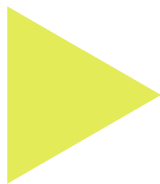
PERISTIWA LUBANG BUAYA

Masih berhubungan dengan Gerwani, peristiwa Lubang Buaya adalah salah satu peristiwa yang tidak diketahui kebenarannya. Lokasi ini memang menjadi pusat pelatihan bagi sukarelawan dari organisasi pro-Soekarno yang hendak dikirim beperang ke Kalimantan dan Irian Jaya. Bagi Soeharto dan sekutu militernya, semua orang yang dilatih di desa tersebut dianggap terlibat dalam G-30S. Versi buku sejarah, surat kabar (yang disortir beritanya), dan kabar burung yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat mengatakan bahwa pada peristiwa tersebut terjadi penyiksaan besar-besaran terhadap Jenderal-Jenderal.

Untuk menyelidiki penyebab kematian Jenderal yang terbunuh, dilakukan proses otopsi terhadap mayat mereka. Dalam dokumen *visum et repertum* yang digunakan dalam pengadilan, tercatat ada lima orang yang terlibat dalam proses otopsi, yakni dr. Liauw Yan Siang, dr. Lim Joe Thay, Brigadir Jenderal Dr. Roebiono Kertopati, Kolonel Dr. Frans Pattiasina, dan Dr. Sutomo Tjokronegoro. Dalam dokumen tersebut, diungkapkan bahwa ternyata tak ada luka bekas penganiayaan, murni luka tembak. Kendati demikian, dalam proses otopsi tak dilakukan pemeriksaan mendalam dikarenakan keluarga yang tak setuju.

Lebih jauh mengenai penganiayaan fisik, pun tidak ada. Rumor (dan berita dalam surat kabar Angkatan Darat) yang mengatakan bahwa ada bukti mata dicukil hingga kemaluan dipotong, tak benar adanya. “Nggak ada, semua utuh”, ungkap dr. Liauw Yan Siang, seorang dokter patologi forensik yang tergabung dalam kelompok pelaku otopsi mayat-mayat Jenderal yang sudah membusuk pada saat pemeriksaan.

Menurut hasil otopsi, kondisi anggota tubuh dari mayat Jenderal-Jenderal yang terbunuh masih lengkap, tak tampak adanya penganiayaan, kecuali menggunakan alat sengat listrik yang tak bisa dilacak bekasnya karena kondisi mayat yang sudah membusuk. Menurut beliau, yang ada hanya bekas pukulan benda tumpul dan patah tulang kaki pada mayat Jenderal S. Parman.

SUPERSEMAR

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) merupakan surat pamungkas bagi Soeharto untuk menjadi penguasa di Indonesia. Surat ini berhasil membawa Soeharto menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun. Surat yang sejatinya berisi perintah Sukarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum, serta meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. Namun, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Sukarno. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto begitu menerima surat tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya. Surat itu dibuat mengatasnamakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir Soeharto sendiri.

BUKAN MITOS, NAMUN BELUM MENJADI FAKTA:

JUMLAH KORBAN

Sebagai partai Komunis ketiga terbesar di dunia, Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki jumlah yang sangat besar. Jumlah kader yang dimiliki oleh PKI sejumlah 300.000 orang, dengan anggota sebanyak dua juta orang yang tersebar di seluruh nusantara. Pembantaian yang dilakukan untuk menghapus Komunisme dan aktor-aktor yang menggerakkannya dilakukan oleh militer.

Korbannya tidak sedikit, sama seperti versi argumen yang memaparkan jumlahnya. Selain itu, verifikasi jumlah korban juga sulit dilakukan karena tidak ada catatan resmi saat itu. Pihak komunis cenderung membesarkan jumlah korban, sementara militer melakukan sebaliknya. Namun, beberapa pihak sepakat korban pembantaian dalam Peristiwa 1965/66 berjumlah 500 ribu jiwa sebagai angka yang moderat. Namun, yang dimaksud korban bukan hanya yang tewas, namun juga yang dirampas haknya.

Sekurang-kurangnya **85.483** korban tewas,
11.500 orang dijadikan budak,
41.000 orang dipindahkan secara paksa, dan
31.000 orang mengalami penyiksaan
(Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966)

78.000
(Tim Pencari Fakta, namun menurut Menteri Negara yang sekaligus Ketua Tim, Oei Tjoe Tat menyebut jumlah itu terlalu dikecilkan)

500.000
korban tewas (Stanley Karnow dari Washington Post)

430.590
korban tewas (Iiwan Gardono, dalam The Destruction of the Indonesian Comunist Party)

300.000
korban tewas (Seth King dari New York Times)

Korban tewas lebih dari setengah juta orang (Seymour Topping dari New York Times)

MEREKA YANG (TIDAK) HARUM NAMANYA

"Sebagian besar komandan setempat telah menunaikan tugas sebaik-baiknya untuk membunuh kader-kader (PKI) sebanyak-banyaknya." (dalam wawancara Seymour Topping, wartawan New York Times dengan Mayjen Sumitro pada November 1965) [1]

Setelah G-30S, terdapat reaksi balik berupa aksi-aksi penggalangan yang menyudutkan pengikut, simpatisan dan organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi target penggalangan opini yang menyudutkan posisi Gerwani seolah-oleh sebagai pelaku kekerasan, dan pelecehan seksual terhadap para Jenderal yang menjadi korban Peristiwa 1 Oktober 1965.

Proses selanjutnya adalah dimunculkannya histeria anti-Komunis berupa penangkapan, penyiksaan, pembunuhan serta pembuangan jutaan orang yang dituduh berideologi "kiri". Dari mereka yang hidup sebagian dijebloskan ke dalam berbagai penjara di tanah air, sebagian lagi dikirim ke Pulau Nusakambangan dan Pulau Buru.

Setelah kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret atau yang akrab dikenal dengan Supersemar, Soeharto dan aparatur di bawahnya melanjutkan proses diskriminasi terhadap simpatisan PKI atau yang dituduh terlibat PKI, seperti stigmatisasi sebagai orang yang "tidak bersih lingkungan". Pembunuhan massal, yang dilanjutkan dengan pengasingan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusian yang tak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada dan dapat diakses, kami mencoba memetakan siapa individu, institusi pemerintah, hingga organisasi masyarakat yang paling aktif dalam mengorganisir salah satu pembantaian paling berdarah di abad ke-20. Dugaan kami ini adalah ikhtiar untuk memberikan alternatif pengetahuan bagi anak muda, terutama terhadap propaganda Orde Baru yang mengatakan bahwa pembantaian gila-gilaan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan respon alami masyarakat atas berbagai intimidasi dan teror yang dilakukan oleh anggota PKI sebelumnya.

[1] Dikutip dari Topping, "Slaughter of Reds" hal 16 di dalam Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Institut Sejarah Sosial Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 32-33

INDIVIDU

SOEHARTO

Gerakan 30 September diduga menjadi dalih bagi Soeharto untuk menegakkan kediktatoran militer di Indonesia dengan menciptakan keadaan darurat nasional dan situasi yang amat kacau. Soeharto dinilai memberikan perintah bagi pimpinan Angkatan Darat pada waktu itu untuk mengejar, membersihkan, dan menghancurkan PKI. Ia menutupi fakta bahwa terjadi banyak pertumpahan darah terutama di Jawa dan Bali untuk menghentikan aktivitas PKI di daerah.[2]

SARWO EDHIE WIBOWO

Sarwo Edhie merupakan Komandan Pasukan RPKAD yang terlibat dalam pembantaian massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pada tahun 1965. Sarwo Edhie memerintahkan pasukan RPKAD untuk membantu tentara Batalyon Kodam VII/Diponegoro, polisi daerah, dan organisasi afiliasi militer dalam menghadapi simpatisan PKI. Sarwo Edhie banyak melakukan perintah-perintah kepada pasukan RPKAD dari markas-markas militer daerah, seperti Markas Kodam VII/Diponegoro, Markas RPKAD di perbatasan Boyolali, dan pos-pos polisi daerah.

[2] *Ibid*, hal 8-15

INSTITUSI

ANGKATAN DARAT (AD)

Selain berperan sebagai pelaksana titah Soeharto untuk memberangus segala aktivitas PKI, baik aktivitas organisasi maupun aktivitas bernapas para pemimpin dan anggotanya, Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar dalam pekan pertama bulan Oktober 1965.[3]

AD menerapkan sensor terhadap beberapa surat kabar yang diperbolehkan terbit. Sensor ini menyebabkan tak ada satupun berita yang memuat kekejian militer membunuh lebih dari setengah juta jiwa penduduk Indonesia di banyak daerah. Tidak hanya itu, militer mengkambinghitamkan PKI yang menjadi pelaku tunggal kekerasan di tengah masyarakat sehingga partai tersebut wajib untuk ditumpas. Belum puas sampai situ, AD juga melarang masuk wartawan asing ke Indonesia sejak Oktober 1965 serta membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menyelinap masuk di dan ke Jakarta.[4]

AD melatih, memberi senjata, kendaraan, serta jaminan kebal hukum bagi orang bukan masyarakat sipil biasa (dalam hal ini artinya adalah masyarakat sipil yang terdidik militer) untuk memburu anggota PKI di daerah-daerah di Indonesia.[5]

[3] *Ibid*, hal 29-30
[4] *Ibid*
[5] *Ibid*, hal 36-37

RPKAD (RESIMEN PASUKAN KHUSUS ANGKATAN DARAT)

Pada tanggal 7 Desember 1965, RPKAD tiba di Bali untuk menunaikan tugas yang dibebankan oleh Soeharto padanya. Sebelum tanggal tersebut, tidak ada pembunuhan terhadap anggota PKI yang berarti di Bali. Pada bulan Oktober – November 1965, situasi di Bali memang menegangkan, di mana gerombolan anti-Komunis menyerang dan membakar rumah-rumah anggota PKI. Beberapa anggota PKI pun ditangkap dan sebagian lainnya menyerahkan diri ke polisi untuk mendapatkan perlindungan. Seluruh pimpinan PKI masih hidup saat RPKAD tiba di Bali.[6]

Tanggal 16 Desember 1965 RPKAD mengatur dan melaksanakan eksekusi mati pimpinan PKI Bali di Desa Kapal. Tercatat terdapat sekitar 30 orang yang dibantai oleh resimen ini dengan disaksikan politisi-politisi anti-Komunis di Bali Selatan. Sehari setelah kejadian, Soeharto datang ke Bali.[7]

KOMANDO PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (KOPKAMTIB)

Kopkamtib merupakan organisasi yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, Soeharto, dan dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1965 dengan tujuan melakukan pembasmian terhadap unsur PKI/Komunis di masyarakat.

Berdasarkan laporan Komnas HAM dalam penyelidikan Tim Ad Hoc terhadap pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 – 1966, Kopkamtib dinilai bertanggungjawab melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap 500.000 hingga 3 juta jiwa penduduk sipil yang disangka PKI atau simpatisan PKI pada kurun waktu tersebut. Laporan Komnas HAM ini merupakan runutan peristiwa berdasarkan kesaksian 349 saksi hidup yang terdiri atas korban, pelaku, atau saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut.[8]

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*

[8] Revianur, Aditya, “Komnas HAM: Kopkamtib Bertanggung Jawab dalam Peristiwa 1965-1966”, Kompas Online, http://nasional.kompas.com/read/2012/07/24/09000971/Komnas.HAM.Kopkamtib.Bertanggung.Jawab.dalam.Peristiwa.1965-1966

NADHATUL ULAMA

Tak perlu ditutup-tutupi bahwa sedikit banyak Nadhatul Ulama terlibat dalam pembasmian kaum komunis terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tanggal 5 Oktober 1965, NU mengeluarkan “Resolusi Mengutuk Gestapu”, suatu surat pernyataan yang berisi sikap resmi NU menanggapi G-30S (Gerakan 30 September) dan PKI, serta membentuk “Komando Aksi Pengganyangan Gestapu” (KAP GESTAPU). Hal-hal tersebut, yang mau tak mau, menjadi legitimasi bagi warga NU melakukan pembasmian terhadap kader-kader PKI.

CIA

Meskipun masih menjadi sebuah spekulasi bahwa terdapat campur tangan Amerika Serikat terhadap kejadian G-30S, penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi berikut ini.

Berdasarkan buku John Roosa dan juga laporan Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM berat periode 1965 – 1966, Washington sangat bergembira akan adanya peristiwa penindasan dan pembasmian PKI di Indonesia. Gelombang demonstrasi yang dipimpin oleh PKI untuk menyerang fasilitas pemerintah AS di Indonesia menjadi sebuah ketakutan yang begitu besar bagi Amerika mengingat AS menganggap Indonesia merupakan sumber “emas” yang lebih berharga dibanding gabungan Negara-negara Indocina seluruhnya. Kehilangan Indonesia menjadi sebuah kehilangan yang sangat mahal dialami oleh AS jika PKI terus melancarkan demonstrasinya menolak pengaruh Amerika di Indonesia.[9]

Banyak artikel dalam surat kabar AS memberitakan kebahagiaan Washington terhadap kudeta berdarah yang terjadi di Indonesia Max Frankel dalam *New York Times* menyatakan “AS Gembira karena Kekalahan Kaum Merah dalam Kudeta di Indonesia” dalam 10 hari setelah G-30S meletus. James Reston dalam *New York Times* menyebut “transformasi biadap” di Indonesia sebagai “secercah cahaya di Asia” – tentunya bagi Amerika - (*pen*). Dalam majalah *Time*, kenaikan Soeharto dianggap sebagai kabar terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia.[10]

Dalam tulisan Timur Subangun, beliau mengutip makalah Bradley Simpson yang berjudul *Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia* (2011) yang berisi keterangan bahwa demi menjaga kepentingan ekonomi AS dan juga mengembalikan Indonesia ke pangkuan Barat agar tidak anti-kolonialis dan anti-imperialis, jalan yang dilakukan adalah dengan menghancurkan PKI dan menggulingkan Soekarno.

Bradley Simpson juga mengorek arsip rahasia AS dan menemukan telegram, memo, *airgram*, dan kabel informasi CIA yang mengindikasikan adanya keterlibatan AS dalam provokasi terjadinya peristiwa tahun 1965.[11]

Laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa kemenangan rezim Soeharto menghancurkan PKI merupakan keuntungan berlipat-lipat ganda bagi AS. Komnas HAM bahkan menambahkan, (tanpa mengurangi kata yang ada), *“Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan sejumlah politisi sipil dengan tragedi G-30S maupun reaksi berantai pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penghilangan, perkosaan, diskriminasi, dan penghilangan hak-hak perdata maupun hak-hak politik.”*[12]

9 *Op.cit*, hal. 15-19

10 *Ibid*

11 Subangun, Timur, “Maaf, Sarwo Edhie Bukan Pahlawan Bangsa!”, Berdikari Online, http://www.berdikarionline.com/maaf-sarwo-edhie-bukan-pahlawan-bangsa/#ixzz3mY0nAhxn

12 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966, hal. 27

ANONIM: "BANGSA YANG TIDAK KENAL SEJARAHNYA, TIDAK KENAL DIRINYA SENDIRI..."

Dilepas pada 2012, *The Act of Killing (Jagal)* membuat geger dunia. Film dokumenter yang digarap oleh Joshua Oppenheimer itu mengikuti jejak Anwar Congo, pimpinan pasukan Pemuda Pancasila yang membunuh ratusan ribu orang secara semena-mena pada Pembantaian 1965-66. Dalam film tersebut, Anwar mereka ulang adegan-adegan pembunuhannya lewat adegan ala film koboi, detektif, hingga drama musikal. *Jagal* terlihat absurd dan mencekam. Oppenheimer merekam pengakuan seorang pembunuh massal yang jangankan menyesal, dianggap salah saja tidak. Situasinya, ucap Oppenheimer, ibarat pergi ke Jerman empat puluh tahun setelah pembantaian massal Holocaust, tapi “para Nazi masih berkuasa.”

Jika *Jagal* merekam pengakuan pelaku, sekuelnya, *The Look of Silence* (Senyap) menunjukkan skenario di mana keluarga korban dengan berani mewawancarai dan mengkonfrontir pelaku. Lagi-lagi, film ini mendapat sambutan hangat dari publik, namun dikecam oleh pemerintah.

Oppenheimer tidak sendirian dalam membuat dua film monumental ini. Ia juga dibantu oleh tim produksi, yang banyak berisi kru film berkebangsaan Indonesia. Namun, demi melindungi diri mereka dari rongrongan aparat, para kru ini memilih untuk tak mengungkapkan namanya (anonim).

Kami berhasil menghubungi salah satu kru Anonim, dan meminta ia bercerita tentang *Jagal* dan *Senyap*.

Ceritakan awal mula keterlibatan anda dalam *Senyap & Jagal*, serta kenapa anda terdorong untuk ikut memproduksi film ini meski isu yang diusung masih sangat 'mengerikan' di Indonesia?

Saya sudah tertarik dengan isu di sekitar G30S sejak saya kelas 6 SD dan mendapatkan pelajaran Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk pertama kalinya. Pada saat itu saya mendapatkan pertanyaan pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan "Sangat Setuju", "Setuju", "Ragu-Ragu", "Tidak Setuju", dan "Sangat Tidak Setuju." Salah satu pertanyaannya, seingat saya kurang lebih berbunyi, "Partai Komunis Indonesia (PKI) harus dibubarkan karena terlibat dalam G30S."

Pada saat itu saya bertanya kepada ayah saya, dan ia menunjukkan beberapa buku dan tulisan akademik yang meragukan bahwa PKI, sebagai partai, terlibat dalam G30S. Karena menurut saya masih belum jelas, maka saya jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapat saya: "Ragu-Ragu." Saya sudah menyiapkan argumen sekiranya saya ditanya mengapa saya berpendapat demikian. Seingat saya, hampir semua pertanyaan saya jawab dengan "Ragu-Ragu."

Tetapi keesokan harinya ketika PR diperiksa, tidak ada diskusi, tidak ada pembahasan. Guru di kelas mendiktekan jawaban yang "benar" dan saya mendapatkan nilai 5 (dari maksimal 10). Jika saya terus menerus mendapat nilai seperti ini, rapor saya akan berisi angka merah. Dari peristiwa ini saya merasa ada yang salah dengan bagaimana sejarah kita ditulis dan diajarkan kepada siswa.

Menginjak remaja, kira-kira di SMA yang semakin banyak membaca dan mengetahui mengenai adanya babak gelap pembantaian massal 1965 pasca G30S yang sama sekali tidak disebut dalam pelajaran sejarah di sekolah. Ini adalah sebuah penggelapan sejarah, sebuah manipulasi yang menyebabkan bangsa Indonesia tidak peka terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya. Ketika sebuah bangsa tidak mengenali sejarahnya, bisa dikatakan, bangsa tersebut juga tidak mengenali identitasnya sendiri.

Secara pribadi, sejarah pembantaian massal 1965 yang hilang dari buku teks sejarah juga begitu membekas, apalagi ketika saya mendengar cerita yang disampaikan dengan berbisik bahwa ada keluarga dan teman dekat keluarga yang juga menjadi korbannya. Saya mulai bisa merasakan besarnya skala luas dan pentingnya penggelapan sejarah pembantaian massal 1965 dan dampaknya pada Indonesia saat ini.

Pada saat saya saya mulai bekerja, saya terlibat dalam sebuah kampanye yang berusaha mencegah kerusakan lingkungan. Dalam kampanye ini, saya juga belajar bagaimana membuat film dokumenter. Salah satu hal yang saya temui dalam film dokumenter yang saya buat adalah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hari ini adalah ketiadaan organisasi akar rumput, serikat tani, serikat buruh, atau organisasi politik yang kuat dan bisa mempengaruhi proses politik. Dan penghancuran organisasi akar rumput itu dimulai dari sejak 1965.

Tiba-tiba saja pertanyaan "Apakah PKI, juga organisasi yang berafiliasi dengannya, kelompok kiri, serikat buruh, serikat tani perlu dibubarkan" terbersit. Jawaban yang didiktekan di kelas saat itu adalah, "Sangat Setuju." Persoalan besar masih tertinggal, bagaimana propaganda hitam yang penuh dengan manipulasi fakta, ancaman, dan teror ini bisa terus berlangsung, bahkan sesudah Soeharto terguling dari kekuasaannya.

Bagi saya isu ini penting dan sangat relevan hari ini. Ini bukan mengenai sejarah atau masa lalu Indonesia. Persoalan ini adalah persoalan hari ini: mengenai bagaimana sejarah ditampilkan dan bagaimana cara menampilkan sejarah itu mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Mulai dari soal teror preman perushaan pada serikat tani, dipalak preman pasar, sampai *illegal logging* dan *illegal fishing*. Ini bukan persoalan yang terisolasi di pasar, di hutan, atau di laut. Ini adalah persoalan yang dimulai dari jantung kekuasaan politik Indonesia, ketika sebuah rezim dibangun di atas kebohongan, teror, dan ketakutan. Sebuah rezim yang menyembunyikan kuburan massal dari sejarah dan pengetahuan umum rakyatnya.

Pada 2005, melalui seorang kenalan, Joshua menghubungi saya lewat *email*. Ia membutuhkan seorang asisten produksi dan penerjemah untuk eksplorasi filmnya di Sumatera Utara. Ia menjelaskan tentang proses pembuatan filmnya yang sudah dirintis beberapa tahun sebelumnya, *The Globalisation Tapes*. Bagi saya, film yang sedang dibuat ini mengangkat tema yang sangat penting dan Joshua melakukan pendekatan yang menurut saya sangat menarik, yaitu dengan mendekati para pelaku dan mengajak penonton untuk masuk ke dalam imajinasi mereka.

Saya kemudian memutuskan untuk membantu pembuatan film *The Act of Killing*/Jagal dan *The Look of Silence*/Senyap. Sejak awal, saya dan juga kru Indonesia lain sadar bahwa membuat film ini membawa risiko dan kemungkinan yang cukup mengerikan. Itu sebabnya, sepanjang pembuatan film kami juga berdiskusi mengenai bagaimana menghadapi berbagai kemungkinan itu. Persoalannya bukan mengenai risiko apa yang kami hadapi jika film ini dirilis di Indonesia. Yang lebih dalam dan mengkhawatirkan persoalannya adalah: apakah risiko keselamatan pada kru itu ada atau tidak?

Pada akhirnya, dengan berbagai diskusi yang melelahkan dan setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, untuk mengurangi risiko tersebut, kami menggunakan nama "Anonim" sebagai nama untuk seluruh kru berkebangsaan Indonesia.

Bagaimana proses produksi kedua film tersebut?

Pada awalnya, tim produksi *Jagal* mendekati warga sekitar dan penyintas lewat kenalan dan jaringan serikat buruh perkebunan yang sudah ada sejak pembuatan film *The Globalisation Tapes*. Kami datang berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengobrol dan menyampaikan maksud kami untuk membuat film dan merekam cerita mereka. Jika mereka bersedia, kami akan datang dengan kamera. Pada awalnya kedatangan kami tidak menarik perhatian, tetapi kemudian aparat sering datang untuk melihat dan bertanya; dan paling sering menanyakan izin. Aparat yang datang bermacam-macam, kadang aparat desa, yang sering datang petugas intelijen kepolisian dan Koramil setempat. Pernah juga kami didatangi sekelompok preman yang disewa perusahaan perkebunan yang khawatir kami melakukan pengorganisasian buruh perkebunan untuk melancarkan protes, atau memperuncing konflik antara buruh dengan perusahaan perkebunan.

Kehadiran orang-orang tak diundang ini, yang katanya datang untuk melihat-lihat dan bertanya, seringkali menginterupsi perekaman gambar yang sedang berlangsung, adalah sebuah bentuk intimidasi baik kepada awak film maupun kepada narasumber. Tak jarang, kami kemudian diberi tahu bahwa petugas kembali datang setelah awak film pulang dan petugas mendesak agar warga tidak lagi menerima kami di rumahnya. Beberapa keluarga korban tidak mengindahkan intimidasi ini dan tetap melanjutkan proses pembuatan film. Tapi, kami harus melakukannya dengan sangat berhati-hati. Pada saat seperti itulah, suara seperti suara motor yang lewat, selalu menjadi tanda bagi kami untuk bersiap-siap menyembunyikan alat, jika saja petugas intelijen datang kembali untuk melihat-lihat.

Suatu ketika, intimidasi dari preman perusahaan perkebunan gagal menghentikan kami dan warga membuat film. Polisi berseragam datang ke lokasi dan membawa seluruh peralatan dan awak film ke kantor polisi untuk “dimintai keterangan.” Agar tidak menciptakan ketegangan di rumah tempat kami melakukan perekaman gambar, kami memenuhi permintaan mereka. Kami tahu bahwa polisi bisa “meminta keterangan”, di mana saja tak harus di kantor polisi, dan proses ini bisa berlangsung singkat saja.

Kami tahu bahwa ini adalah jenis intimidasi yang lain terhadap warga. Mereka ingin menunjukkan bahwa polisi bisa ‘menangkap’ siapa saja yang mereka inginkan. Kami ikut ke kantor polisi, dan hanya mendapatkan dua pertanyaan, “Sedang membuat film tentang apa, izinnya mana?” Tetapi untuk dua pertanyaan itu kami ‘ditahan’ beberapa jam, sampai kemudian dilepaskan kembali dengan segala peralatan dan rekamannya. Segera kami sadar bahwa mereka tidak memerlukan keterangan apapun yang bisa didapat dengan bertanya dan kirim *email*, mereka hanya ingin kami menghentikan proses pembuatan film dan mengintimidasi warga.

Dalam situasi ini, untuk tidak menciptakan ketakutan pada warga, kami hanya bekerja bersama mereka yang betul-betul ingin menyampaikan ceritanya kepada khalayak luas di Indonesia dan kepada dunia, dan bersedia meneruskan perekaman gambar. Keluarga Adi Rukun adalah salah satu keluarga yang ingin agar proses pembuatan film berlanjut. Adi, yang kemudian menjadi tokoh dalam film *Senyap*, ingin sekali belajar mengenai sejarah terutama yang berkaitan dengan pembunuhan massal yang membuat kakaknya menjadi salah satu korban.

Kami sadar bahwa sekadar membuat film dan menyampaikan cerita bisa mengundang intimidasi yang tak diinginkan — yang seharusnya tidak terjadi — dan menciptakan ketakutan. Pada suatu pertemuan, warga penyintas dan keluarga korban merasa was-was tapi ingin agar cerita yang menimpa mereka tetap disampaikan. Mereka menyarankan agar kami mendatangi para pelaku dan merekam cerita dari mereka. Usul ini tidak terbayangkan sebelumnya. Kami memberanikan diri untuk mendatangi pelaku, dan menceritakan bahwa kami sedang membuat film sekaligus penelitian mengenai sejarah setempat. Di luar dugaan kami, para pelaku selalu bersemangat menceritakan pengalamannya melakukan pembunuhan massal tersebut dan tak jarang menyiapkan alat peraga serta memberi arahan bagaimana kami seharusnya memfilmkan mereka agar peragaan ulang ini menjadi terlihat 'otentik.'

Dari satu pelaku, kami menelusuri pelaku lain, dan mendapatkan reaksi yang kurang lebih sama. Mereka sepertinya ingin menyampaikan sebuah cerita untuk menegaskan kepahlawanan mereka, menunjukkan peran penting mereka dalam sejarah nasional dan dunia, sekaligus menebarkan ancaman: bahwa mereka tidak pernah dihukum dan perbuatannya bukanlah kejahatan. Pernyataan seperti ini seperti berusaha ingin menyampaikan ancaman kepada yang mendengarnya untuk tidak menggugat dan mempertanyakan cerita serta perbuatan mereka.

Apakah tim produksi mendapat intimidasi dari aparat, ormas, atau individu lain setelah produksi?

Salah satu upaya kami untuk menghindari intimidasi yang ditujukan secara personal kepada awak film Indonesia adalah dengan menggunakan nama Anonim dalam credit title. Cara ini cukup ampuh, sejauh ini, untuk menangkal intimidasi atau gangguan lain. Walaupun begitu, dari waktu ke waktu, selalu ada saja ancaman bahkan ancaman pembunuhan yang dilancarkan lewat *email* atau media sosial. Ancaman tersebut tidak kami balas atau kami hiraukan lebih lanjut.

Menurut anda sendiri, bagaimana tanggapan publik luas tentang film Jagal dan Senyap, terutama di Indonesia?

Tanggapan publik luas di Indonesia atas film *Jagal* dan *Senyap* bagi kami sungguh luar biasa dan melegakan. Kami merasa sangat tersanjung dengan kerja keras dan keberanian para penyelenggara pemutaran film *Jagal* dan *Senyap*. Bagi kami sendiri, dan kelihatannya begitu juga bagi para penyelenggara pemutaran kedua film ini, perjuangan untuk memutarkan film, menyebarkan dan mendapatkan informasi kepada khalayak luas tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kebebasan berekspresi. Termasuk di dalamnya juga kebebasan mimbar akademik dan kebebasan pers.

Seorang pemimpin redaksi di Bogor pada 2012 di bawah tekanan ratusan anggota ormas dipaksa meminta maaf secara terbuka akibat pemberitaan mengenai film *Jagal*. Ia dipukuli dan terluka; tetapi ia menolak tunduk pada pemaksaan itu. Ia mengadukan pelaku kekerasan pada polisi, dan membawa perselisihan akibat pemberitaan ini pada Dewan Pers.

Sebuah pemutaran di Purwokerto didatangi puluhan anggota ormas yang meminta pemutaran dibatalkan; tapi panitia dengan berani meminta mereka yang berkeberatan agar menonton filmnya terlebih dahulu dan berdiskusi setelahnya. Pemutaran tetap dilaksanakan dan diskusi berakhir dengan damai.

Seorang pegiat perfilman dihadang polisi ketika hendak memutarkan film *Senyap* di bioskop, dan ia melawannya dengan membawa seluruh penonton ke pemutaran di sebuah sekretariat organisasi wartawan di Kota Padang.

Pada 2015, sekelompok mahasiswa di Yogyakarta bersiap menghadapi kekerasan menolak tekanan organisasi massa yang hendak membubarkan paksa pemutaran film *Senyap*. Di bawah tekanan polisi, ormas, dan bahkan pihak universitas sendiri, sambil menyerukan kebebasan akademik, para mahasiswa itu berhasil menyelenggarakan pemutaran dan diskusi tanpa insiden dan kekerasan. Mereka lebih beruntung dari rekan lainnya yang menghadapi pemutusan aliran listrik di universitas lain untuk mencegah diputarkannya film kami. Peristiwa yang sama, dengan skala berbeda, terjadi di Sulawesi Barat, ketika panitia pemutaran menolak untuk menghentikan pemutaran atas desakan petugas kepolisian.

Lebih dari empat ribu lembaga, universitas, LSM, serikat buruh, komunitas budaya, komunitas korban dan penyintas, berbagai kelompok masyarakat, serta perseorangan mengadakan pemutaran, baik yang terbuka maupun tertutup, dengan berbagai cara melawan tekanan dari aparat, organisasi massa, juga lembaga sensor; sehingga puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, orang Indonesia lainnya bisa menonton film kami, *Jagal*, dan kemudian *Senyap*; mendapatkan informasi darinya; dan kemudian berdiskusi mengenai masalah yang diangkat dalam film tersebut.

Seorang pemuda dari desa Bulumulyo meminta DVD film Jagal untuk diputarkan di desanya, tak jauh dari kuburan massal pembantaian tahun 1965. Ia kemudian menulis surat bahwa DVD tersebut diputar bergiliran di delapan desa yang semuanya berdekatan dengan kuburan massal. Dalam suratnya itu ia juga bercerita bahwa pada 2013, di penghujung Ramadhan para warga desa untuk pertama kalinya sejak 1965 membersihkan kuburan massal tersebut dan secara terbuka mendoakan anggota keluarganya yang terkubur di dalamnya.

Betul bahwa ada banyak tekanan pada pemutaran yang didesak atau bahkan dipaksa untuk dibatalkan, walaupun demikian, penghadangan pemutaran ini tidak pernah menyurutkan minat masyarakat luas untuk menonton filmnya. Semua pemutaran terbuka yang dibatalkan diubah oleh penyelenggara menjadi pemutaran tertutup atau dipindahkan lokasinya. Mengingat besarnya antusiasme masyarakat ini, kami dengan senang hati membagikan DVD film *Jagal*/*Senyap* kepada siapa saja yang ingin mengadakan pemutaran, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik yang dihadiri ratusan penonton di aula perguruan tinggi maupun yang bersama keluarga di rumah-rumah.

Apakah tanggapan itu sudah sesuai harapan, bagi anda?

Tanggapan dari publik menurut kami sangat positif dan itu sering membuat kami terharu. Kami banyak mendapatkan surat dari penonton yang menceritakan bagaimana diskusi dan perbincangan berlangsung sesudah pemutaran. Sebagian menjadi tersadar akan adanya sebuah babak gelap dalam sejarah Indonesia, dan bahwa kita perlu membenahinya bersama. Sebagian lagi mendapatkan sebuah penjelasan mengenai apa yang kini tengah berlangsung di dalam lingkungan kecil keluarganya atau dalam lingkup yang lebih besar secara nasional.

Tanggapan dari pemerintah, dari sejak diluncurkannya film *Jagal* pada 2012 menurut kami tidak memadai. Misalnya, seorang Menteri bisa mengatakan, “Pembunuhan ribuan warga pada 1965 harus dilihat sebagai bentuk pembelaan pada negara.” Cara berpikir rezim Orde Baru yang berusaha menutup kejahatan terhadap kemanusiaan masih ada, dan segera saja terdengar seperti sebuah ancaman, terus mendominasi pernyataan politik pejabat pemerintah.

Ketika film *Jagal* dinominasikan mendapat Oscar, barulah Juru Bicara Kepresidenan menanggapi film tersebut; juga dengan tidak memadai. Tanggapan pemerintah yang paling efektif memangkas penyebarluasan film *Senyap* datang dari Lembaga Sensor Film yang melarang pemutaran untuk publik. Lagi-lagi pelarangan ini disampaikan dengan tidak memadai, dengan alasan yang tidak relevan.

Harapan kami bahwa kedua film kami dapat memantik dan membuka ruang-ruang bagi perbincangan mengenai babak gelap sejarah Indonesia, kami rasa, sedikit banyak telah tercapai. Dengan luasnya persebaran film kami, juga dengan berbagai publikasi di media, kami merasa sebagian harapan kami telah tercapai dalam hal bahwa film Jagal dan Senyap dapat mengajak penonton untuk melihat dampak pembantaian massal 1965 yang terlihat sampai hari ini, juga sebagai peringatan bahwa ketika impunitas menggejala, kekerasan massal yang didukung atau dibiarkan oleh negara bisa terulang kembali.

Kami punya harapan yang lebih besar lagi bahwa di Indonesia akan terjadi sebuah proses rekonsiliasi sejati; ketika kebenaran diungkap, keadilan ditegakkan, dan korban direhabilitasi. Ketika pelajaran sejarah di sekolah lebih jujur mengisahkan cerita dari masa lalu. Tapi kami juga sadar bahwa harapan sebesar ini tidaklah dapat dicapai oleh satu atau dua film kami sendirian. Diperlukan lebih banyak karya lain, buku film, teater, musik, puisi, sastra, dan diperlukan banyak aktivitas selain pemutaran, pementasan, diskusi dan juga lewat berbagai saluran media cetak, elektronik, internet untuk membongkar pola pikir Orde Baru serta menembus tebalnya tembok-tembok penghalang ke gedung-gedung pemerintah dan wakil-wakil rakyat, untuk menggugah mereka melakukan sesuatu yang serius dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari masa lalu, menghapus segala bentuk impunitas, dan mencegahnya berulang kembali.

Kami sadar bahwa harapan besar ini harus diperjuangkan bersama.

SIAPA (BERANI) BILANG GERWANI

Ada banyak alasan mengapa Peristiwa 1965 masih tetap penting untuk dibicarakan hari ini. Bagi sejarawan Hilmar Farid, misalnya, peristiwa 1965 bukan sekadar pelanggaran HAM. Jika kita mau mengamati secara historis dampak-dampak sosial yang terjadi setelah peristiwa tersebut, kita akan menyadari bahwa banyak sekali aspek kehidupan manusia di Indonesia yang turut berubah. Selain 'terawatnya' budaya kekerasan yang militeristik, peristiwa 1965 juga sangat mempengaruhi matinya perkembangan politik berbasis kelas sosial, termasuk pergerakan perempuan di Indonesia. Peristiwa 1965 dan pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sesudahnya juga menghancurkan organisasi-organisasi massa lainnya yang dianggap berhubungan dekat atau berafiliasi dengan PKI: salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani.

Kita yang tumbuh besar di era Reformasi terlanjur mewarisi berbagai anekdot tentang Peristiwa 1965 yang kerap kita dengar dari orang-orang di sekitar kita - kadang tanpa keinginan lebih lanjut untuk mencari tahu apakah sesuatu yang disebut "sejarah" tersebut benar adanya. Gerwani adalah salah satu anekdot penting dalam bangunan sejarah kita tentang Peristiwa 1965, yang sayangnya lebih sering kita ingat sebagai sekelompok perempuan yang menyiksa para Jenderal yang diculik oleh PKI pada malam tanggal 30 September tersebut. Mereka adalah para perempuan yang mencungkil mata dan memotong alat kelamin para Jenderal dengan benda tajam. Bahkan, di dalam film berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* (1984) ada sebuah adegan di mana seorang perempuan Gerwani menyayat wajah seorang Jenderal dengan silet sambil mengucapkan dialog yang terkenal: *"Penderitaan itu pedih, Jenderal!/Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat!"*

Sudah sejak tahun 1987, segala tuduhan penyiksaan para Jenderal yang dilakukan oleh perempuan-perempuan anggota Gerwani ini terbantah. Pada tahun tersebut, sejarawan dari Universitas Cornell bernama Benedict Anderson melansir temuan bukti otopsi (*visum et repertum*) tim dokter terhadap jenazah para Jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya. Hasil otopsi itu mengatakan bahwa tidak ada bekas-bekas penyiksaan seperti luka sayatan silet atau benda tajam. Luka-luka yang terdapat di tubuh para Jenderal adalah bekas luka tembak dan benda tumpul.

Ben Anderson menuliskan bukti ini di dalam tulisannya yang berjudul "*How Did the Generals Die*?" yang kemudian membuatnya dicekal datang ke Indonesia oleh Soeharto. Namun, pembentukan citra Gerwani sebagai para perempuan yang kejam ini sudah dimulai sejak Oktober 1965, segera setelah peristiwa 1965 terjadi dan para Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan di bawah komando Soeharto. Berbagai surat kabar di Indonesia ketika itu memuat berita bagaimana Gerwani telah menyiksa para Jenderal dengan silet dan benda tajam, ditemukannya benda tajam pencungkil bola mata, serta beredarnya berbagai kesaksian dari Angkatan Bersenjata tentang bagaimana anggota Gerwani mencongkel mata dan memotong alat kelamin para Jenderal, dan kemudian bertelanjang menarikan tarian "*Bunga Harum*" bersama ketua PKI D.N. Aidit dan organisasi Pemuda Rakyat setelah selesai membunuh para Jenderal. Citra Gerwani sebagai para perempuan bengis inilah yang masih melekat di dalam ingatan banyak di antara kita.

Kamp Plantungan. Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tahanan yang sebelumnya rumah sakit lepra

MENGAPA GERWANI DIKAITKAN DENGAN PKI

Diresmikan pada 25 Januari 1954, Gerwani pertama kali didirikan pada tahun 1950 dengan nama Gerwis (Gerakan Wanita Istri Sedar), yang merupakan gabungan dari enam organisasi perempuan: Rupindo (Rukun Putri Indonesia Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerwindo (Gerakan Wanita Indonesia Kediri), Wanita Madura dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruan). Tidak main-main, para tokoh yang mendirikan Gerwis adalah tokoh-tokoh perempuan terkemuka pada masa itu, seperti S.K. Trimurti (Mantan Menteri Perburuhan), Salawati Daud (walikota Makassar), Umi Sardjono (Pejuang Laskar Perempuan), Tris Metty dan Sri Panggihan.

Meski berdiri sebagai organisasi perempuan, Gerwis juga memiliki tujuan yang sama dengan banyak organisasi-organisasi yang tumbuh ketika itu. Yaitu, mendukung kemerdekaan dan mengakhiri praktek-praktek feodalisme dan penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Semangat sosialisme kemudian dipilih sebagai basis perjuangan untuk membangun gerakan perempuan yang melintasi perbedaan kelas sosial di dalam masyarakat.

Gerwani sangat vokal menyuarakan berbagai isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan yang saat itu kurang menjadi perhatian. Pada masa itu, perempuan kerap diperlakukan sewenang-wenang di dalam keluarga, seperti ditinggal oleh suaminya atau mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Perempuan juga dianggap warga kelas dua yang tidak boleh dipilih menjadi pemimpin, bahkan menjadi lurah sekalipun.

Gerwani kemudian sangat giat mendukung para perempuan untuk berpolitik dan menjadi pemimpin, selain juga menyuarakan isu perkosaan yang dialami oleh banyak perempuan di Jawa dan Bali, memperjuangkan undang-undang perkawinan yang lebih adil, serta mengadakan berbagai kegiatan untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat terutama bagi petani dan buruh perempuan. Termasuk di dalam berbagai aktivitas yang dilakukan Gerwani untuk mencerdaskan perempuan, Gerwani mendirikan sekolah, koperasi, taman kanak-kanak, berbagai kursus keahlian untuk perempuan seperti tata buku dan manajemen, serta mendidik para perempuan untuk menjadi guru.

Karena kegiatan-kegiatannya ini, Gerwani menjadi sangat populer di masa itu. Sejumlah perempuan dari berbagai profesi seperti buruh, petani, guru, bidan dan akademisi bergabung ke dalamnya. Anggota mereka lantas mencapai 1,5 juta orang.

Selama lebih dari satu dekade sejak berdiri, Gerwani dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi massa dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia. Pada tahun 1960-an, reputasi Gerwani sebagai organisasi besar tempat berhimpunnya para perempuan berpikiran progresif sudah sangat dikenal. Di bawah kepemimpinan Umi Sardjono, lebih dari 1500 balai penitipan anak dibangun oleh Gerwani; di mana untuk menitipkan anak-anaknya, para petani dan buruh tidak perlu membayar. Gerwani juga menentang praktik prostitusi dan berjuang menghalau kerusakan moral. Gerwani membangun martabat perempuan sebagai sosok ibu yang pekerja keras, sederhana dan gigih, sekaligus sebagai sosok perempuan mandiri yang sadar akan hak-hak politiknya dan bisa berkedudukan sejajar dengan laki-laki di ruang publik.

Kedudukan dan reputasi seperti ini tentu membuat kelompok-kelompok konservatif, yang masih beranggapan bahwa tempat bagi perempuan adalah di dalam rumah, merasa gelisah dan terancam. Gerakan perempuan yang dibangun oleh Gerwani ditandai sebagai potensi kekuatan tandingan yang dapat mengancam posisi laki-laki, dan karenanya, perlu dihancurkan dan “dikembalikan” kepada kodratnya.

Para tahanan politik perempuan di kamp plantungan.

Momentum penghancuran gerakan perempuan itu muncul ketika peristiwa 1965 terjadi. Fitnah disebarkan bahwa Gerwani menyiksa para Jenderal dan berkomplot dengan PKI untuk melakukan kudeta. Padahal, sebenarnya Gerwani sendiri tidak pernah secara resmi berafiliasi dengan PKI. Di dalam buku berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan* yang ditulis oleh penulis dan peneliti gerakan perempuan Saskia E. Wieringa, justru ketika itu tidak semua anggota Gerwani setuju terhadap dominasi PKI dalam pergerakan Gerwani dan terasosiasinya Gerwani dengan PKI.

Jika dilihat secara historis, mungkin keterkaitan ini muncul karena demikian banyaknya aktivitas Gerwani yang dilakukan bersama kelompok buruh dan tani, seperti SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Buruh Tani Indonesia (BTI), yang juga merupakan basis massa PKI. Tentu keterkaitan itu tidak dapat dihindari, sebab hal-hal yang diperjuangkan Gerwani dan PKI ketika itu sama. Gerwani giat mendampingi kelompok buruh dan petani perempuan, karena bagian dari perjuangan mereka juga adalah untuk memperjuangkan kenaikan upah dan hak cuti haid bagi buruh perempuan.

IMAJINASI GERWANI

Secara historis, fitnah-fitnah yang ditimpakan terhadap Gerwani memiliki dampak yang luas terhadap gerakan perempuan di Indonesia. Penghancuran Gerwani adalah salah satu bagian dari usaha untuk menihilkan perwakilan perempuan di ruang publik, serta memunculkan berbagai stigma tentang perempuan yang vokal, aktif, dan progresif sebagai perempuan yang "bengis" dan "komunis".

Sejarawan Hilmar Farid pun berkata bahwa sejak awal, kampanye anti-Komunis memang terarah secara khusus kepada perempuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan sosok perempuan yang mulai tumbuh sebagai kekuatan politik. Berbagai berita bohong dan fitnah terhadap Gerwani disebar tidak hanya untuk menyebar kebencian dan ketakutan terhadap Gerwani secara khusus, tetapi terhadap semua perempuan yang berpolitik secara umum.

Apa dampaknya? Perempuan yang berpolitik dianggap sebagai perempuan yang berbahaya. Dengan menyebar ketakutan dan kebencian tersebut, pemerintah Orde Baru "menertibkan" kembali para perempuan dan menjadikan mereka istri dan ibu di dalam rumah. Perempuan kembali menjadi objek, juga objek dalam berbagai kebijakan pemerintah seperti program Keluarga Berencana, yang menuntut perempuan untuk mengendalikan kemampuan reproduksinya, pemaksaan bagi perempuan yang sudah menikah untuk menggunakan alat kontrasepsi.

Dalam jangka panjang, bahkan hingga kini, perempuan masih kerap diposisikan sebagai objek berbagai peraturan dan kebijakan yang diskrimnatif, diatur bagaimana harus bersikap, bahkan dibatasi ekspresi politiknya. Sudah berapa kali kita dengar hingga kini bagaimana perempuan dipaksa menikah di usia anak-anak, dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau menjadi korban kekerasan?

Kemiskinan imajinasi, begitu yang juga disebut Hilmar Farid sebagai salah satu warisan politik Orde Baru pasca 1965. Banyak di antara kita yang hingga kini masih kesulitan mengimajinasikan suatu masyarakat yang di dalamnya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta ketiadaan kekerasan yang diciptakan secara struktural bagi perempuan. Gerwani dulu pernah berimajinasi, berjuang agar imajinasi tersebut menjadi realita bagi para perempuan Indonesia. Lima puluh tahun berlalu, apakah imajinasi tersebut masih tetap saja jauh dari kata terwujud?

Referensi:

1. http://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/

2. http://www.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/49404/sumini-mantan-aktivis-Gerwani-bersaksi

3. https://books.google.co.id/books?id=v6pQAYkVVFgC&pg=PA156&lpg=PA156&dq=gerakan+perempuan+orde+lama&source=bl&ots=Yii6pSbuzs&sig=Z45S44dXb2foUYRn2HnDFPtzCy0&hl=id&sa=X&ved=0CDUQ6AEwBGoVChMIkuaX_9ylyAIVCxWUCh1wew09#v=onepage&q=gerakan%20perempuan%20orde%20lama&f=false

4. http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/2054-gerakan-perempuan-sejarah-yang-hilang.html

5. http://indoprogress.com/2011/04/jalan-teguh-sang-pemimpin/

6. http://www.academia.edu/9654711/Sejarah_Gerakan_Perempuan_di_Indonesia (Terbitan Divisi Pendidikan dan Kampanye Perempuan Mahardhika)

SETELAH KESAKTIAN PANCASILA

Setelah Pancasila (katanya) membuktikan kesaktiannya pada 1 Oktober 1965, ratusan ribu - bahkan jutaan - orang yang diduga, dituduh, atau dianggap terkait dengan PKI ditangkapi dan dibawa ke berbagai kamp pekerja paksa. Yang ditangkap termasuk aktivis, guru, buruh, seniman, dan penduduk biasa yang dinilai dapat mengancam kekuasaan Orde Baru.

Di kamp-kamp ini, mereka hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tinggal di bawah teror para penjaga. Bahkan setelah mereka dibebaskan, mereka dan keluarganya tidak dianggap 'bersih' oleh pemerintah dan dipersulit untuk mendapat pekerjaan, berpindah tempat secara bebas, dan harus wajib lapor ke aparat setiap jangka waktu tertentu. Banyak dari mereka hidup dan meninggal dengan dicap pengkhianat oleh negara - walau banyak dari mereka tak pernah terbukti terlibat dalam PKI, apalagi peristiwa G-30S.

Pelepasan tahanan Politik. Tahanan Politik 65 yg dibebaskan dr pulau buru tiba dengan menggunakan apal LST di Surabaya, Jawa Timur, 28 Desember 1977. Foto: Tempo Eddy Herwanto.

Empat orang tahanan politik di Palu yang mengalami kerja paksa utuk membangun infrastruktur kota. Foto: SKP HAM Palu.

Pulau Buru- para tahanan politik membawa hasil bumi mereka. Foto: TEMPO Amarzan Lubis Acin Yasin Salim Said.

Pulau Buru-para tahanan politik ketika bersiap untuk dipulangkan.
Foto: Tempo Amarzan Lubis Acin Yasin Salim Said.

Pulau Buru-para tahanan politik saat sedang dalam pemeriksaan.
Foto: Tempo Amarzan Lubis Acin Yasin Salim Said.

Pulau Buru-para tahanan politik sedang menanam padi di bawah pengawasan petugas.
Foto: Tempo Amarzan Lubis Acin Yasin Salim Said.

Jembatan bacem sebelum mengalami pemugaran. Jembatan ini menjadi situs pembantaian terhadap orang-orang yang diduga PKI dan simpatisannya pada tahun 65-66. Foto: ELSAM.

Hanya dua tahun setelah Reformasi, sekumpulan santri muda yang tergabung dalam Syarikat Indonesia melacak para penyintas peristiwa pembantaian 1965-66, dan mewawancarai mereka untuk menguak kenyataan sejarah yang selama ini ditutup-tutupi. Yang membuatnya unik: Organisasi keagamaan yang menaungi mereka ikut terlibat dalam pembantaian tersebut.

Pamflet mengobrol dengan Syarikat tentang proses penggalian sejarah mereka, usaha mereka melakukan rekonsiliasi, dan kenapa ngobrol soal '65 masih penting sampai sekarang.

REKONSILIASI ALA SANTRI

Ceritakan sedikit tentang siapa itu Syarikat, bagaimana kalian terbentuk, dan konteks keterlibatan berbagai ormas keagamaan dalam pembantaian 65-66?

Syarikat adalah kependekan dari *Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat*. Di belakang kata Syarikat ada kata Indonesia, jadi Syarikat Indonesia. Ini sebuah komunitas, atau tepatnya sebuah organisasi anak-anak muda NU (Nahdlatul Ulama) yang *concern* pada isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dalam tragedi 1965-66. Dimulai dari tahun 2000, dua tahun setelah Reformasi 1998. Syarikat bertempat di Yogyakarta, dengan anggota jaringan di banyak kota dan kabupaten. Sekitar tahun 2005, anggota jaringan Syarikat ada di sekitar 35 kota dan kabupaten di Jawa dan Bali. Di berbagai daerah, organisasi jaringan Syarikat terdiri dari beragam organisasi seperti Lakpesdam NU dan juga LSM-LSM daerah. Tidak sedikit pula anggota jaringan yang bersifat individu.

Mandat Syarikat Indonesia adalah untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dalam kasus peristiwa tragedi 1965-1966, melalui proses rekonsiliasi. Seperti banyak ditulis peneliti, di berbagai tempat organisasi keagamaan seperti NU terlibat dalam peristiwa itu (***pembantaian, red***). Sebenarnya bukan cuma NU, tapi juga ormas keagamaan lainnya seperti Muhamadiyah dan juga Katolik, juga dianggap terlibat dalam peristiwa itu.
Sebagai anak muda NU, kami bertanya kenapa NU yang dikenal ormas Islam moderat kok bisa terlibat? Apa juga yang sudah dilakukan NU berkait peristiwa ini? Kami merasa ada beban dengan sejarah yang demikian. Beban sejarah yang kami kira harus diselesaikan, agar tidak menjadi penyakit di kemudian hari. Nah, salah satunya dari sinilah Syarikat Indonesia dimulai.

Dan jangan lupa, yang kami lakukan juga terinspirasi dari gagasan Gus Dur. Bisa dibilang, gagasan Rekonsiliasi akar rumput yang diusung Syarikat adalah upaya untuk membumikan gagasan besar Gus Dur untuk mendorong demokrasi di negeri ini.
Kami tidak ingin beban masa lalu itu terus menghantui kami, juga menghantui perjalanan bangsa ini di masa depan. Kami ingin agar persoalan di masa lalu itu diselesaikan. Dengan cara apa? Pertama-tama tentu dengan mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian pada saat itu, dan kemudian melakukan rekonsiliasi. Karenanya, kami kemudian merasa perlu untuk mencari tahu soal kejadian itu secara langsung pada orang-orang yang terlibat atau menjadi korban dari peristiwa itu.

Dari situlah kemudian kami sebisanya melakukan investigasi, bersama anggota jaringan Syarikat di berbagai daerah. Kami melakukan wawancara dengan banyak orang, baik para penyintas maupun para tokoh NU di banyak tempat.

Bagaimana proses kalian mencari dan mendekati para keluarga penyintas? Apakah ada strategi atau kesulitan khusus yang dihadapi?

Saat itu banyak dari teman-teman Syarikat di berbagai daerah juga bingung di mana mencari dan bagaimana mendekati penyintas dan keluarganya. Strategi yang kami lakukan saat itu tergantung masing-masing kami di berbagai daerah, karena cara yang dilakukan oleh teman Syarikat di daerah Jawa Timur bisa beda dengan cara yang dilakukan oleh temen Syarikat dari Jawa Tengah. Jadi tak ada cara atau strategi khusus.

Memang ada banyak kesulitan. Saya sendiri butuh waktu hampir satu bulan untuk bisa mengetahui bahwa si A, B, C dan D itu katanya adalah korban. Itu baru mengetahui "katanya", belum mendekati, dan kami membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa mendekati dan *ngobrol* dengan penyintas dan keluarganya. Bahkan ada yang membutuhkan waktu satu bulan baru bisa mendekati mereka, ada pula yang sampai dua-tiga bulan. Harus bersabar, apalagi banyak korban saat itu masih sangat menutup diri. Tapi syukurlah, meskipun membutuhkan waktu lama, akhirnya tumbuh saling percaya antara kami dengan mereka.

Bagaimana tanggapan mereka, dan juga tanggapan teman-teman Syarikat yang mewawancarai setelah adanya dialog tersebut?

Setahu saya, Syarikat adalah organisasi pertama di luar korban yang melakukan upaya investigasi ini. Dan kebanyakan penyintas, atau malah semua penyintas yang kami termui saat itu, juga baru pertama kali kedatangan tamu yang tidak mereka kenal sebelumnya. Karena itu ada beragam respon dari mereka. Ada yang takut, khawatir dan curiga. Kami rasa itu wajar. Selama ini mereka kan menutup diri, atau lebih pasnya *dipaksa* menutup diri. Pengalaman traumatis pasca peristiwa 65 jelas tidak mudah hilang hanya karena kami datang, bisa-bisa malah mereka semakin ketakutan. Karena itulah kami bersabar, dan ada pula yang hampir gagal karena mereka tidak membukakan pintu. Satu dua kali, bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh kali menemui penyintas. Dari menjelaskan siapa kami dan apa tujuan kami. Kami juga mencari dukungan dari berbagai pihak, terutama para kiai NU. Alhamdulilah, meski pelan mulai ada Kiai yang mendukung gerakan Syarikat.

Proses kami mendekati penyintas sangat membekas dalam pengalaman kami. Susah untuk menjelaskan bagaimana membekasnya, karena setelah proses mendekati mereka yang cukup lama, ternyata itu menjadi kenangan tersendiri. Sampai-sampai ada banyak temen Syarikat karena saking dekatnya dengan keluarga penyintas, lantas temen-temen dianggap bukan lagi sebagai orang lain. Temen-temen malah banyak yang dianggap sebagai anak sendiri. Layaknya hubungan orang tua dan anak, bila misalnya orang tua sakit kangen anak, bila si anak belum datang atau pulang, sakit si orang tua belum sembuh. Ini nyata terjadi, betapa dekat hubungan temen-temen Syarikat dengan keluarga penyintas. Utamanya relasi temen-temen Syarikat yang perempuan.

Apa saja yang kalian tanyakan ke para penyintas, dan apakah ada satu isu atau sudut pandang khusus yang ingin kalian gali?

Bertanya? Mungkin tepatnya bukan bertanya, melainkan mendengar. Jadi begini, setelah kami kenal dengan penyintas, dan bisa duduk bersama tanpa ada rasa curiga, kami menyampaikan bahwa kami ingin mendengarkan cerita mereka. Kami mendengarkan mereka bercerita tentang bagaimana peristiwa itu, dan apa saja yang dialami oleh korban. Tentu, untuk bisa mendengarkan semua itu kami mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa saja, yang bisa membuka ingatan para penyintas akan peristiwa masa lalu. Tidak hanya sekali dua kali, tapi sampai berkali-kali kami harus datang mendengarkan cerita mereka.

Kalau soal sudut pandang, kerja-kerja penelitian Syarikat itu seperti kerja seorang antropolog, yang melakukan suatu penelitian pada kebudayaan tertentu. Kami meneliti, dan mencoba menggali kebudayaan itu dari sudut pandang "*orang-orang yang menjadi bagian dari kebudayaan itu*". Apa yang mereka alami, yang mereka rasakan, serta harapan-harapan mereka. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba memahami bagaimana peristiwa itu dari sudut pandang mereka, juga bagaimana mereka mengalami peristiwa itu. Tidak hanya kepada para penyintas, kami juga mewawancarai NU. Ada banyak kiai NU di berbagai daerah yang kami datangi, kami wawancarai seputar peristiwa itu, bagaimana posisi NU pada saat itu, apa yang dilakukan oleh NU dan setrusnya. Tentu saja menurut sudut pandang mereka.

Kalau tidak salah tahun 2003, Syarikat mencoba mempertemukan mereka dalam suatu forum, khususnya penyintas dan NU. Pertemuan di berbagai daerah setingkat provinsi, seperti di Jawa Tengah juga Jawa Timur. Bisa dibayangkan, bagaimana forumnya saat keluarga penyintas bertemu dengan para kiai NU. Apa yang terjadi? Di awal-awal pertemuan memang agak kaku, bahkan cenderung tidak bicara, tapi setelah forum berjalan beberapa jam, mulai telihat saling kenal dan di hari kedua, sudah muncul *guyon*. Ada saja *joke* yang muncul yang menghiduplan suasana. Apa saja yang dibicarakan sepertinya saat itu kurang penting, karena bisa duduk bersama adalah sesuatu yang pertama kali dalam sejarah Indonesia setelah peristiwa 65/66.

Oh ya, ketika dalam perjalanan investigasi, kami juga mendapati ternyata begitu banyak perempuan yang menjadi korban. Ada perempuan-perempuan yang menjadi korban langsung, tapi juga banyak perempuan yang menjadi korban tidak langsung, seperti mendapat perlakuan diskriminatif karena suaminya disangkut pautkan dengan PKI. Bisa dibayangkan, seorang perempuan mendapat stigma sebagai istri seorang Komunis, ia dihina oleh tetangganya, juga mendapat diskriminasi. Ini banyak sekali, dan karena itu pula, sudut pandang Syarikat dalam investigasi peristiwa 65-66 juga tidak melupakan sudut pandang perempuan.

Apakah usaha kalian ini menemui pertentangan di antara teman-teman NU sendiri? Bagaimana kalian menghadapinya?

Hari ini saja peristiwa 1965-1966 masih sensitif, apalagi ketika awal-awal kami memulai upaya rekonsiliasi di tahun 2000'an. Tentu saja ada yang menentang. Tapi lebih tepatnya mungkin bukan menentang, melainkan belum sependapat. Ada pihak-pihak yang belum sependapat dengan gagasan Rekonsilasi yang kami usung, termasuk juga ada yang dari temen-temen NU. Menentangnya pun dengan berbagai alasan. Meskipun saat itu sudah Reformasi, tapi aura ketakutan terhadap cara kerja kekuasaaan Orde Baru masih sangat terasa. Bahkan hingga hari ini pun masih terasa, kan?

Juga, ada yang menentang karena menganggap bahwa keterlibatan dalam peristiwa itu adalah menyangkut rasa perjuangan melawan komunisme. Ada pula yang menganggap pembantaian itu sudah seharusnya dilakukan, sebagai pembalasan atas peristiwa sebelumnya. Dan banyak argumen lainnya. Ya, waktu itu, dan hingga kini pun, wacana anti-Komunisme masih sangat kental. Meski wacana itu adalah produk Orde Baru, dan meskipun Soeharto telah lengser, tapi wacana anti-Komunisme masih menjadi hantu. Beberapa pihak malah menyebut bahwa menentang Komunisme adalah *jihad fi sabilillah*.

Kami menghadapinya dengan berdialog. Seperti tadi saya sampaikan, dialog antara korban dengan pihak NU misalnya. Dari dialog itu, kami harap akan muncul pemahaman baru. Jadi pihak korban akan mengetahui apa yang dipikirkan oleh pihak lain, atau sebaliknya, sambil terus mencari dan mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dari situ, kita bisa belajar agar peristiwa itu tidak terulang lagi di masa depan.

Oh ya, pertentangan dari pihak keluarga juga ada. Maksud saya, ada temen-temen Syarikat ketika itu yang mendapat tentangan dari pihak keluarga. Misalnya, orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk terlibat di Syarikat. Mungkin khawatir, apalagi ketika itu, wacana anti-Komunisme masih sangat kental. Kami pikir-pikir, sebenarnya Orde Baru belum juga tumbang, *lha wong* hasil-hasil ciptaannya yakni hantu Komunis saja masih gentayangan. Menghadapi tentangan dari keluarga, sekali lagi cara yang dilakukan teman-teman syarikat adalah dengan dialog. *Alhamdulillah*, secara perlahan keluarga kami juga paham.

Apakah kemudian ada usaha lanjutan untuk melakukan rekonsiliasi antara penyintas dengan NU atau pihak pemerintah? Bagaimana dampak lanjutan dari proses penggalian sejarah yang kalian lakukan?

Kalau soal dampak, silahkan dilihat sendiri. Tadi sudah saya bilang, kami melakukan ini sudah sejak tahun 2000 untuk mengupayakan adanya penggalian sejarah. Mungkin yang kami lakukan belum banyak, tapi kami sangat senang ketika kemudian banyak pihak melakukan hal serupa dengan cara lainnya. Dan kita bisa lihat hari ini, makin banyak orang - utamanya penyintas - yang berani mengungkapkan kesaksian dan sebagainya. Tergalinya banyak tuturan penyintas akan peristiwa masa lalu akan memberi penerangan atas masa lalu bangsa ini. Jadi, narasi tentang masa lalu bukan hanya seperti yang dikontruksi oleh Orde Baru, tetapi beragam. Dan utamanya narasi yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Ini yang penting. Ini juga yang sedang kami pikirkan bagaimana jalan ke depannya.

Apa pendapat teman-teman Syarikat tentang permasalahan HAM saat ini?

Pastinya ada perkembangan, kalau tidak, jelas itu namanya kemunduran. Yang mungkin bisa terlihat adalah semakin banyak orang yang berani untuk menarasikan masa lalu dari berbagi perspektif, terutama perspektif korban.

Harapan seperti apa yang diinginkan teman-teman baik untuk Negara, masyarakat, dan siapapun yang *concern* terhadap isu HAM?

Semua pihak perlu terus mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, siapapun dan dari kelompok manapun. Dan negara tetaplah pihak yang bertanggungjawab atas ini, karena itulah pemerintah perlu segera melakukan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Semoga Bapak Presiden Jokowi segera menemukan momentum yang pas. Mari terus kita dorong, dan jangan lupa berdoa. Ini demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Menurut teman-teman di Syarikat, kenapa pelanggaran HAM/ tragedi 65 penting untuk terus dibicarakan hingga saat ini?

Intinya begini. Peristiwa pelanggaran HAM masa lalu itu penting untuk diselesaikan agar ia tidak menjadi batu sandungan masa depan bangsa ini. Melupakan masa lalu itu berarti kita seolah membenarkan berlangsungnya peristiwa kekerasan di masa lalu. Kita seolah membenarkan adanya pembantaian manusia, yang itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga Pancasila. Apalagi juga kita ini sering mengklaim sebagai orang Timur, yang berbudaya. Masa sih orang berbudaya membenarkan peristiwa itu?

Sebaliknya, mengingat masa lalu juga bukan untuk menguak luka lama. Bukan, bukan itu maksudnya. Justru, mengingat masa lalu akan menjadi bahan pelajaran bagi kita semua, semua warga bangsa ini, bahwa di suatu masa dulu, lima puluh tahun yang lalu, pernah ada pembantaian massal. Pembantaian yang melibatkan banyak pihak, yang juga mengandung unsur pembiaran oleh negara. Semua itu harus kita ingat, sebagai *pengeling-eling* (pengingat-ingat) agar peristiwa serupa, meski bentuknya lebih kecil, tidak terulang kembali.

APA YANG SEBENARNYA DIINGINKAN PARA PENYINTAS?

Tak terasa, sudah memasuki tahun ke 50 sejak salah satu pembantaian paling berdarah pada abad ke 20. Mereka yang terlibat, atau dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh, ditangkap, diasingkan, disiksa hingga dirampas hak-hak dasarnya seperti penghasilan, sampai dokumen identitas kewarganegaraan. Bahkan hingga kini, para penyintas masih mengalami diskriminasi. Rasanya keadilan masih jauh menghampiri mereka. Namun, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka?

Untuk mengetahui keinginan penyintas, kami mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan pernyataan para penyintas yang terserak di berbagai dokumen. Siapa tahu, ada yang iseng membaca dan tergerak untuk mewujudkannya.

“Harapan saya, ada pemulihan nama baik, seperti warga negara yang lain. Ada kejelasan tentang sejarah.”

Sudiharjo. Ditahan selama 7 tahun

“Kami terus bertahan hingga saat ini karena kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak bersalah. Kami berharap. Semoga tidak ada lagi saling tuding di dalam masyarakat dan keluarga karena kesalahpahaman dan pemutarbalikan fakta oleh penguasa. Semoga tidak ada lagi peristiwa seperti tahun 1965 agar tahun-tahun depan bisa lebih baik lagi.”

Ferderika Bessie Sinlae.
Ia dan suaminya ditahan dengan tuduhan sebagai anggota PKI dan Gerwani karena nama suaminya ada dalam daftar program pemberian bantuan tanah oleh pemerintah.

“Kami himbau kepada pemerintah supaya film-film tentang ‘65 dihapus karena tidak benar. Sehingga generasi sekarang tidak akan bangun negara bobrok yang tidak adil dan tidak benar. Pemerintah harus melihat ke depan. Mampukah ia minta maaf pada masyarakat, mengobati luka hati yang sekian lama tersayat yang tidak bisa diobati?”

Migelina Anthoneta Markus.
Saksi mata dari gerakan anti-Komunisme pada tahun 1965-1966. Beberapa anggota keluarganya menjadi korban dan dituduh menjadi anggota PKI dan Gerwani meskipun pada faktanya tidak terlibat.

“Saya dan keluarga saya sangat berharap bisa menemukan kuburan Bapak. Kami sudah berusaha ke berbagai tempat dan pihak tetapi gagal. Saya berharap pemerintah bisa menunjukkan lokasi penguburan Bapak saya dan korban-korban PKI lainnya.”

Konrad Penlaana.
Bapaknya dituduh anggota PKI karena memberi izin PKI berkegiatan di desanya dan membela warganya yang ditangkap dan dibawa ke Kalabahi. Bapaknya lantas dibunuh.

“Kami mohon sekurangnya bisa mendesak Presiden untuk menyelesaikan masalah kami. Kami menuntut rehabilitasi, kompensasi dan penghapusan peraturan diskriminatif sesuai surat Mahkamah Agung dan hasil penyelidikan Komnas HAM.”

Alm. Mudjayin.
Ditahan dan kemudian dipindahkan ke Pulau Buru pada tahun 1965-1979.

Memang ada banyak hutang pemerintah ke para penyintas: untuk meminta maaf pada para korban, mengembalikan hak mereka yang dirampas, dan bertanggung jawab untuk membuka kebenaran sejarah yang sesungguhnya. Namun, ada banyak juga anak muda dengan inisiatif-inisiatif keren yang meneruskan perjuangan para penyintas untuk menuntut keadilan, mendukung perjuangan para penyintas, serta menyebarkan pengetahuan sejarah pada anak muda di sekitarnya.

WWW.
PAMFLET.
OR.
ID